LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut Denpasar Triwulan II

BPSPL DENPASAR #BijakMengelolaLaut

Salam PRIMA

@bpspidenpasar

BerAKHLAK

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Getreda Melsina Hehanussa

PENYUSUN

Nurhamdani

Anang Trijayanto Mulyo

Faizal Tuhulele

Suci Kusumastuti Nur Azizah

Dewi Setyaningsih

KONTRIBUTOR

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Denpasar

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GRAFIK ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **2**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 2
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi 3
1.4 Organisasi 5
1.5 Kepegawaian 7
1.6 Potensi 9
1.7 Permasalahan 14
1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA **20**
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **25**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 25
IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) 28
IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) 31
IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) 32
IK 4. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 34
IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 36
IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) 37
IK 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) 44
IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) 46

IK 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) 50
IK 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) 51
IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) 53
IK 12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%) 55
IK 13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) 56
IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) 58
IK 15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)..... 60
IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)..... 62
3.3 Realisasi Anggaran..... 64
BAB IV PENUTUP..... 68
4.1 Kesimpulan..... 68
4.2 Rekomendasi..... 68
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja 6
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia 11
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar 11
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar 11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar 12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024 21
Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025 25
Tabel 8. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar 28
Tabel 9. *Capaian IK 2 BPSPL Denpasar* 31
Tabel 10. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar 32
Tabel 11. Dokumentasi IK 3 34
Tabel 12. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar 38
Tabel 13. Dokumentasi IK 4 39
Tabel 14. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar 36
Tabel 15. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar 42
Tabel 16. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar 45
Tabel 17. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar 49
Tabel 18. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar 51
Tabel 19. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar 52
Tabel 20. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar 54
Tabel 21. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar 56
Tabel 22. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar 57
Tabel 23. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar 59
Tabel 24. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar 61
Tabel 25. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar 64
Tabel 26. *Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025* 66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025 7
Grafik 2. Perincian PPNPN BPSPL Denpasar TA 2025 8
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 20258
Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2025 9
Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar 6
Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar 25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran dan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Triwulan II Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian atas terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Denpasar.

Gianyar, 4 Juli 2025

Kepala BPSPL Denpasar

Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar triwulan II tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan April sampai dengan Juni 2025. Pada pelaporan LKj triwulan II tahun 2025, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada tahun 2025 adalah IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 85 dan capaian 95,80; IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 2 dokumen dan capaian 2 dokumen; IK 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) dengan target 78 dan capaian 84,22; IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 80 dan capaian 100; IK 15 Presentase

Rencana Umum Pengadaan PBJ yang DIumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 76 dan capaian 100.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBP Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBP dari Kementerian Keuangan. Realisasi sampai dengan Triwulan II (Per 30 Juni 2025) sesuai data omspan sebesar Rp5.090.577.395,- (24,68%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp3.873.645.353,- (45,48%), belanja barang Rp1.216.932.042,- (10,15%), dan belanja modal Rp0,- (0%).

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025 adalah 109,85% yang berkategori baik dengan ditandai warna hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BPSPL Denpasar kedepan antara lain; Melaksanakan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES; Melaksanakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar; Melaksanakan peningkatan dalam penataan ruang laut, Melaksanakan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar dengan tatakelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Triwulan II Tahun 2025.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 September 2021. Secara khusus UPT mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

5) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi DJPKRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF);

5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukanya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Muhammad Dikyah Fadillah, S.Pi.	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2025 sebanyak 67 orang terdiri dari 48 PNS, 3 PPPK, 6 PPNPN, dan 10 tenaga kontrak. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025

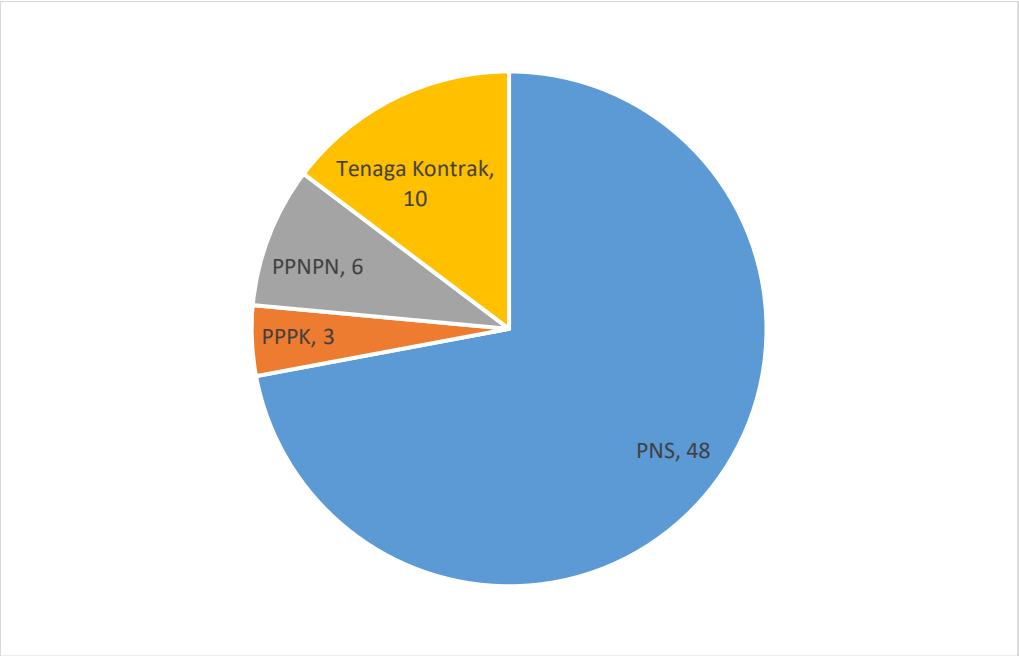

Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 3 orang yang kesemuanya berada di Wilker Bali. Sedangkan perincian tenaga kontrak kesemuanya berjumlah 6 orang yang tersebar di Wilker Jawa Timur 1 orang, Wilker NTB 2 orang, Wilker NTT 1 orang dan Wilker Bali 2 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Perincian PPNPN BPSPL Denpasar TA 2025

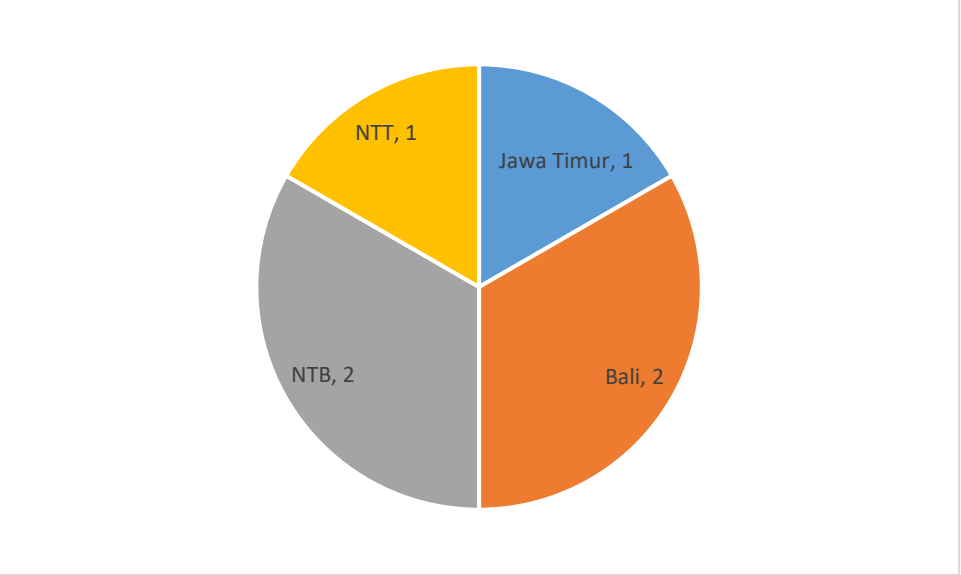

Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2025

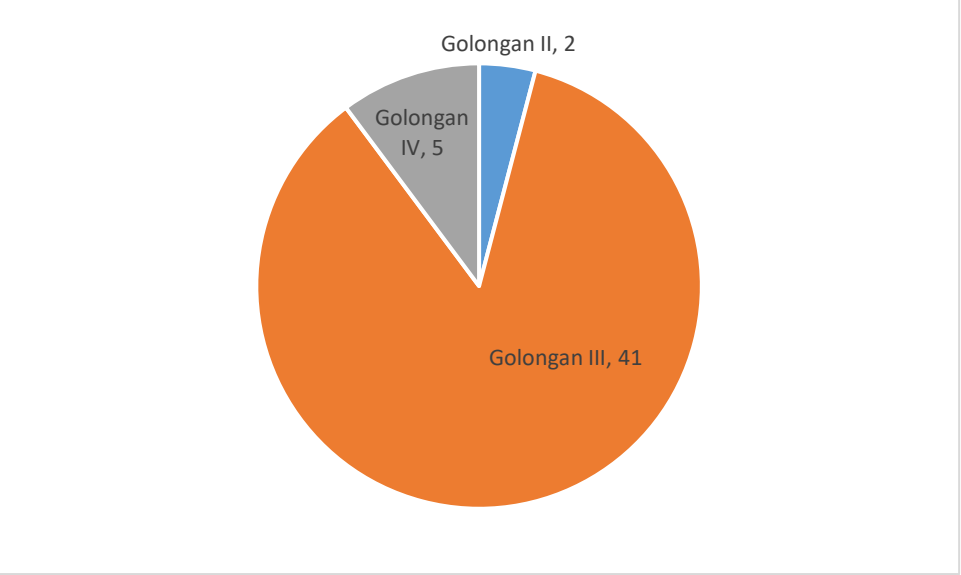

Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2025

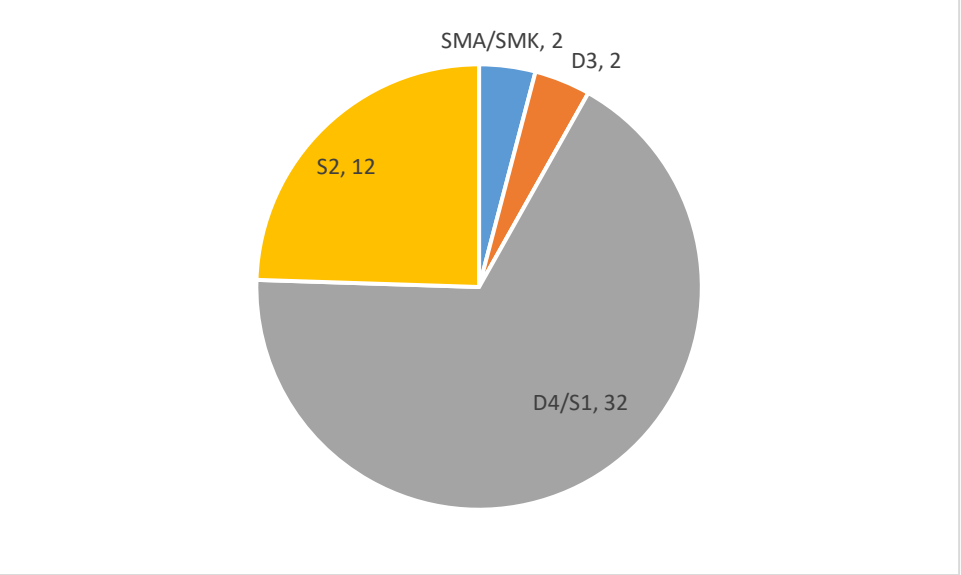

Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 3 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPSPL Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025

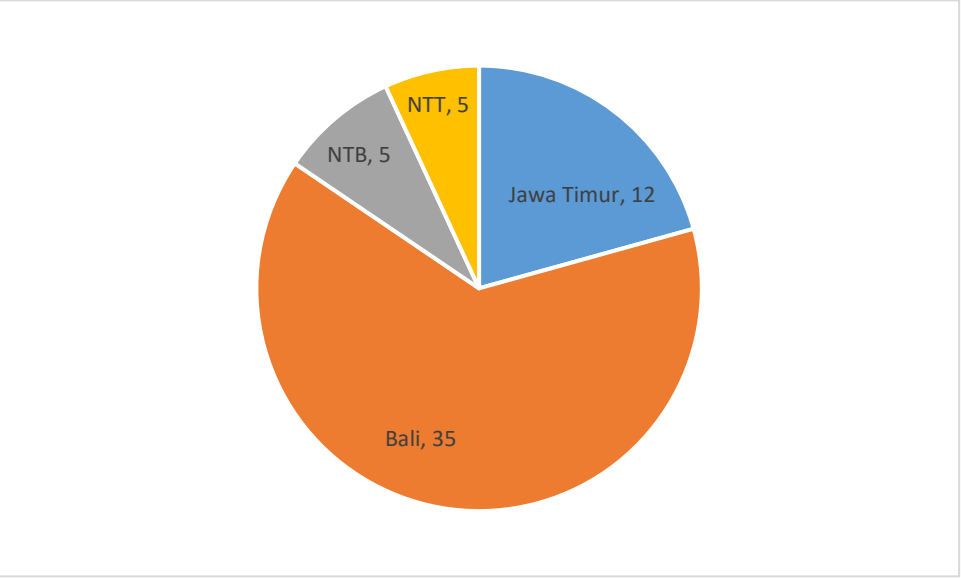

1.6 Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber

daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi "*services*" yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem

pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		**2,517,858**

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

BPSPL Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat selam. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang

cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi , maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
c. Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
d. Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

1.7 Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahu efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi

2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNBP.
4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu dijumpainya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
6. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.
7. Aktivitas *destructive fishing* yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.

8. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
9. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
10. Terdapat beban kerja yang sangat tinggi dan permasalahan yang komplek terkait pengelolaan ruang laut di Jawa Timur. Perlunya penataan organisasi dengan pembentukan UPT di Jawa Timur.

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum :

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2025.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di"*cascading*" (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, perjanjian kinerja BPSPL Denpasar sampai dengan Triwulan II mengalami penyesuaian sebanyak dua kali. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 24 Januari 2025. Kemudian dilakukan perubahan dan disahkan pada Juni 2025. Adapun perubahan yang dilakukan anatara lain; pemisahan perjanjian kinerja Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu pada Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen), serta penambahan Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) pada perjanjian kinerja Kepala BPSPL Denpasar dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		8.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		9.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBP Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaanya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-.

Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBP dari Kementerian Keuangan. Sampai dengan Triwulan II terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp2.395.198.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.395.198.000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan II (Per 30 Juni 2025) sesuai data omspan sebesar Rp5.090.577.395,- (24,68%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp3.873.645.353,- (45,48%), belanja barang Rp1.216.932.042,- (10,15%), dan belanja modal Rp0,- (0%).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi http://kinerjaku.kkp.go.id. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2025 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 109,85 (baik).

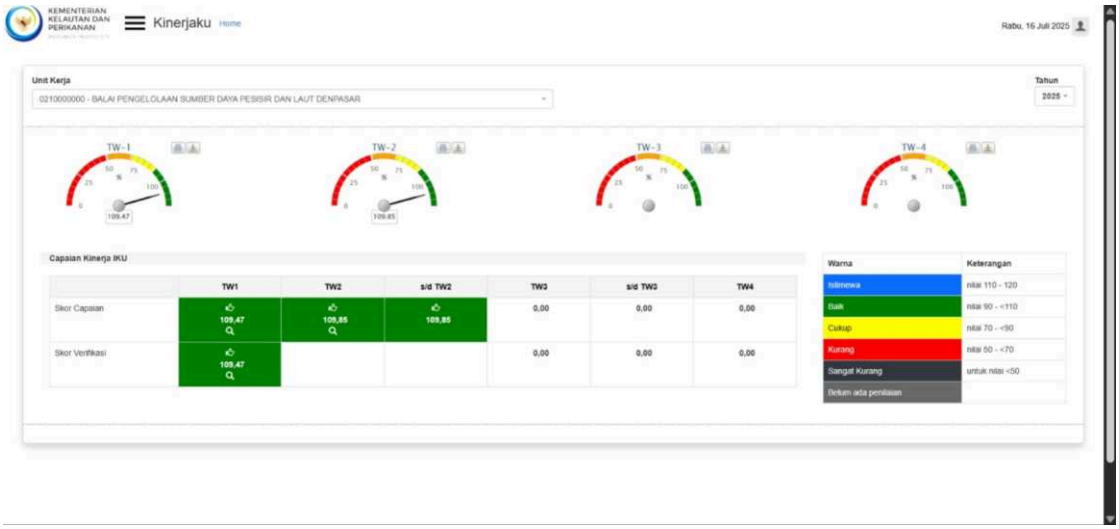

Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar

Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW II		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	Tahun	1,00	0,00	0,00	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan	Tahun	30,00	0,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW II		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
	Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)					
3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahun	5,00	0,00	0,00	-
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	0,00	0,00	-
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	1,00	0,00	0,00	-
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	80,00	80,00	100,00	120
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahun	100,00	0,00	0,00	-
8	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	75,00	0,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW II		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
9	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	70,00	0,00	0,00	-
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	92,00	85,00	95,80	-
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	71,50	0,00	0,00	-
12	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4,00	2,00	2,00	100
13	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	Semester	80,00	78,00	84,22	-
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	0,00	0,00	-
15	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	76,00	76,00	100,00	-
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	91,00	0,00	0,00	-

IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Formulasi perhitungan yaitu dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

Tabel 8. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar

SK 1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain rapat tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dan koordinasi kegiatan dengan pihak terkait.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai fasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) antara lain:

1. Masterplan Infrastruktur Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Dilakukan penyusunan dan penyempurnaan TOR untuk dapat dilakukan proses pengadaan jasa serta dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengadaan kontrak yang dilakukan pusat.
2. *Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Kegiatan berikut merupakan kegiatan kontraktual yang dapat dilaksanakan setelah kegaitan Masterplan Infrastruktur Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor telah selesai. Selain itu proses kontraktual dan pelaksaan DED membutuhkan jangka waktu lama sedangkan kegiatan Masterplan belum dilaksanakan hingga bulan ini. Oleh karena itu hasil rapat tindak lanjut kegiatan diusulkan kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Telah dilakukan rapat internal kegiatan Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.
4. Monitoring Biofisik, dan Penjangkauan-Keterlibatan Aspek Sosio-Ekonomi Budaya Masyarakat di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Kegiatan berikut merupakan kegiatan kontraktual sehingga membutuhkan jangka waktu panjang namun sampai sekarang belum ada kepastian tentang pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, dalam rapat tindak lanjut kegiatan ini diusulkan tidak dilaksakan pada tahun berjalan.
5. Survei Jenis Prioritas Konservasi di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Kegiatan berikut merupakan usulan tambahan, tidak termasuk prioritas *Annual Work Plan* (AWP) kegiatan *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA. Sehingga dalam rapat tindak lanjut diusulkan revisi kegiatan dan untuk sementara kegiatan ini tidak dilaksanakan.

6. Rehabilitasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Kegiatan Rehabilitasi Habitat Kritis (Terumbu Karang) memerlukan kemampuan selam, sementara Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Alor yang memiliki sertifikasi selam masih minim. Pada tahun ini direncanakan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui kegiatan sertifikasi selam scuba untuk masyarakat dan SUOP, dengan harapan dapat melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Habitat Kritis (Terumbu Karang) pada kesempatan berikutnya. Sehingga pada rapat tindak lanjut kegiatan diusulkan kegiatan berikut tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

7. Respon Cepat Penanganan Mamalia Terdampar di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Telah dilakukan rancangan rencana penarikan dana dan Revisi rencana anggaran biaya, serta mengikuti rapat tindak lanjut kegiatan *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA.

8. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Telah dilaksanakan Perencanaan *Term of Reference*, Perencanaan kegiatan dengan SUOP, dan Penyusunan serta kepastian TOR

9. Kajian Perhitungan Daya Dukung Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

   Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, sudah tersedia data/informasi terkait Daya Dukung Kawasan Konservasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia. Oleh karena itu, pada rapat tindak lanjut kegiatan diusulkan kegiatan ini tidak dilaksanakan.

10. Fasilitasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

    Telah dilaksanakan kegiatan atara lain; membuat rencana penarikan dengan penyesuaian anggaran, dan berkoordinasi dengan PIC SUOP dan proses perbaikan *Term of Reference*.

IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas dalam pemanfaat kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar Kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 9. *Capaian IK 2 BPSPL Denpasar*

SK 2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	30	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain membuat rencana penarikan dana, dan mengikuti rapat tindak lanjut kegiatan *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA. Serta melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alor dilanjutkan proses perbaikan TOR.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Penguatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di kepulauan Alor.

IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like species* seperti Hiu, Pari, *Soft Coral*, Banggai Cardinal Fish dan Teripang.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like spesies* yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 10. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar

SK 3	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	5	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain kegiatan verifikasi jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diatur peredarannya secara daring. Kegiatan penerbitan dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri dan rekomendasi secara daring, kegiatan verifikasi permohonan Berita Acara Verifikasi Lapang Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) secara daring, kegiatan verifikasi stok opname bulanan secara daring, penyusunan SOP, Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai targat jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES sebagai berikut:

1. Kegiatan verifikasi jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diatur peredarannya secara daring
2. Kegiatan penerbitan dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri dan rekomendasi secara daring
3. Kegiatan verifikasi permohonan Berita Acara Verifikasi Lapang Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) secara daring
4. Kegiatan verifikasi stok opname bulanan secara daring

5. Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025 pada tanggal 30 Juni 2025
6. Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

   Sejak tanggal 18 September 2021 BPSPL Denpasar telah melakukan penarikan PNBP terhadap produk pemanfaatan jenis ikan. Adapun total penarikan PNBP yang telah dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar di seluruh Wilker pada Triwulan II tahun 2025 adalah Rp675.334.556,- sehingga total penerikan PNBP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp1.264.188.878.-

Tabel 11. Dokumentasi IK 3

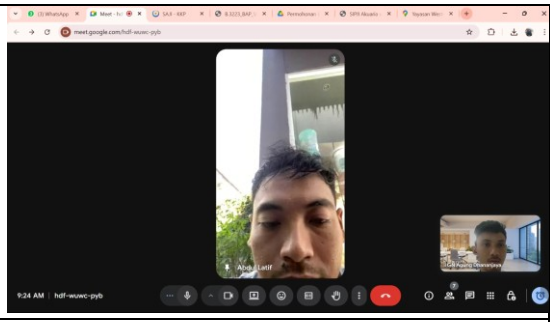

Verifikasi pemeriksaan jenis ikan secara Online

Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025 pada tanggal 30 Juni 2025

IK 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus

dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik. Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik:

a. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
b. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari SIPJI (Verifikasi Lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi).

Tabel 12. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 4	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 5	Nilai Minimun Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain pelaksanaan kegiatan pelayanan verifikasi lapang SIPJI, pelayanan SAJI-DN dan survei kepuasan masyarakat.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan verifikasi lapangan SIPJI secara daring
2. Kegiatan verifikasi dan penerbitan SAJI-DN secara daring
3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap pelayanan penerbitan dokumen telah selesai dilaksanakan.

IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencangkup 3 (tiga) hal sebagai berikut: Jumlah pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; dan Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 13. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 5	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain dilaksanakan Koordinasi Kegiatan Pendataan Pulau-Pulau Kecil oleh Direktorat Pengelola Kelautan kepada UPT Pelaksana Kegiatan Pendataan Pulau-Pulau Kecil, Sosialisasi KAK

identifikasi pemanfaatan Pulau-pulau Kecil oleh Pusat, Sosialisasi Juknis Kegiatan Identifikasi Pulau - Pulau Kecil Terluar, dan Revisi TOR.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) antara lain:

1. Dilaksanakan Koordinasi Kegiatan Pendataan Pulau-Pulau Kecil oleh Direktorat Pengelola Kelautan kepada UPT Pelaksana Kegiatan Pendataan Pulau-Pulau Kecil.
2. Sosialisasi KAK identifikasi pemanfaatan Pulau-pulau Kecil oleh Pusat
3. Sosialisasi Juknis Kegiatan Identifikasi Pulau - Pulau Kecil Terluar
4. Revisi TOR

IK 6. IK. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 14. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar

SK 4	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres dari kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai targat dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut
   a. Menghadiri undangan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRL sejumlah 50 permohonan yang dilaksanakan oleh Ditjen PRL

b. Melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRL sejumlah 24 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar
c. Telah dilaksanakan coaching pra KKPRL kepada 12 pemrakarsa

2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut
   a. Penyelesaian sengketa laporan masyarakat terhadap KKPRL yang telah diterbitkan pada sekitar Labuan Bajo NTT
   b. Identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar pada Provinsi Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB melalui Citra
   c. Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Banyuwangi terhadap kegiatan uji coba budidaya mutiara di Kecamatan Muncar
   d. Rapat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
   e. Rapat Internal dengan KCD terkait permasalahan double sewa lahan kepada pemerintah oleh salam bajo dan perusahaan lain (sudah terdapat sertifikat bahwa sertifikat tersebut sudah terbit sejak 1996)
   f. Rapat Pembahasan rencana pemanfaatan pasir laut pada kegiatan BBCP Phase 2
   g. Rapat Tindak Lanjut Aduan BPTNKPS Manggarai Barat terhadap para pemegang Pkkprl di Manggarai barat
   h. Penyelesaian sengketa Pemanfaatan Ruang PT Inti Putra Pertiwi Persada dengan PT Pacific Masami Indonesia

Tabel 15. Dokumentasi IK 4

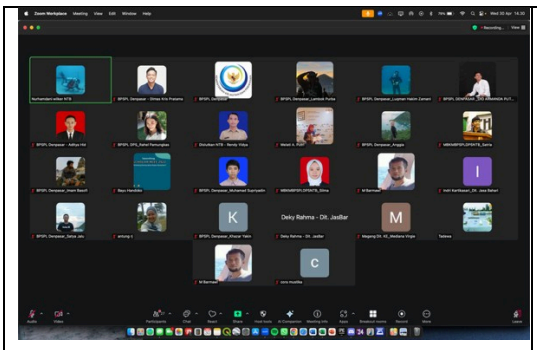	
Verifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	*Coaching clinic*

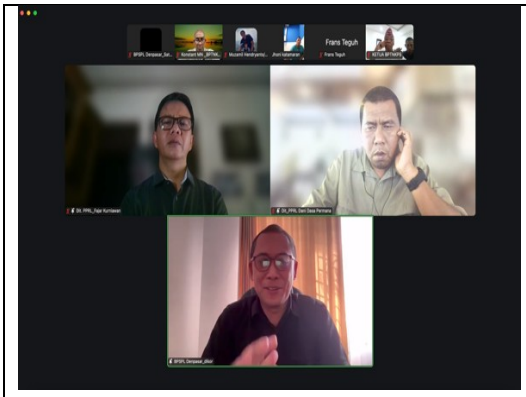

Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

IK 7. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Denpasar. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Ditjen PKRL. Data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat Ditjen PKRL.

Kategori dan Predikat nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform).* Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang

Predikat	Nilai	Interpretasi
		Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 16. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 6	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	88	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan perencanaan program dan anggaran serta layanan monitoring evaluasi dan pelaporan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
  a. Revisi anggaran berupa relaksasi blokir efisiensi anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yaitu penghapusan blokir kode A dan pencantuman blokir kode 2 tanggal 10 April 2025
  b. Revisi anggaran pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2025 dan Revisi POK Satker tanggal 24 April 2025
  c. Menghadiri kegiatan Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 secara daring tanggal 29 April 2025
  d. Rapat Agenda rencana penarikan anggaran Lautra TA 2025 tanggal 20 Mei 2025
  e. Penyampaian usulan revisi DIPA dalam rangka buka blokir anggaran pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- pada tanggal 26 Mei 2025
  f. Pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kemenkeu nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025
  g. Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2025 sesuai permohonan data dari Kanwil DJPB Provinsi Bali
- Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  a. pengisian aplikasi kinerjaku
  b. pembahasan pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi Triwulan I DJPKRL dan Setditjen PKRL Tahun 2025 pada tanggal 9 April 2025 secara online

c. penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2025
d. verifikasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 lingkup DJPKRL melalui aplikasi Kinerjaku KKP pada tanggal 14 April 2025 secara online
e. menghadiri undangan penyusunan laporan kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 secara online
f. mengikuti sosialisasi EMonev Bappenas Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 secara online
g. verifikasi capaian kinerja pada aplikasi eMonev Bapennas pada tanggal 2 Mei 2025 secara daring
h. melakukan perbaikan dokumen pada aplikasi Kinerjaku
i. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas
j. Evaluasi rencana aksi BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025

IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
2. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
3. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA >70.

Formula Perhitungan:

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^{7}$ $(Nilai\ Indikator\ n\ x\ Bobot\ Indikator\ n) : Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 17. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
99,31	85	95,80	112	-7	92	104

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target nilai 85 yaitu dengan memperoleh nilai IKPA 95,80%. Adapun rincian nilai pada indikator ini adalah kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA 100, deviasi halaman III DIPA 90,94); kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran 85,77, belanja kontraktual 100, pengelolaan UP dan TUP 100); kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian oautput 100).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024, capaian kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 7%. Hal tersebut dikarenakan penghentian pelaksanaan program *Oceans for Prosperity Project*-LAUTRA sesuai surat dinas dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025, terdapat blokir anggaran yang bersumber dari dana PNBP, dan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang telah direncakanan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Denpasa.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Rekonsiliasi LPJ Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Penerimaan Negara Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN Denpasar

IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1. Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RVRO_i}{TVRO_i}\right) x \frac{1}{n}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

$RVRO_I$: Realisasi Volume RO i

$TVRO_i$: Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK\ + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK\ + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU}\right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i}\right) x\ \frac{1}{n}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 18. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TWI I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	71,5	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan BMN, layanan rumah tangga, dan layanan operational perkantoran.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai kinerja perencanaan anggaran BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan BMN
  a. Melakukan Pemutakhiran Data Aset pada Siman versi 2
  b. Melakukan pendaftaran user Kepala Satker dan user Operator untuk proses Pemindahtanganan BMN melalui lelang atau penjualan
  c. Melakukan transaksi pencatatan BMN berupa perubahan kondisi barang, pengehentian penggunaan BMN dari penggunaan
  d. Penyampaian usulan persetuuan penghapusan BMN kepada Pengguna Barang
  e. Melakukan pencatatan transaksi barang persediaan
  f. Melakukan koordinasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL Denpasar
  g. Melakukan pencatatan transaksi barang persediaan bulan Juni 2025
- Layanan rumah tangga; Penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar
- Layanan perkantoran
  a. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
  b. Operasional dan pemeliharaan kantor secara rutin

IK 10. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025:

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 19. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 9	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
1	1	1	100	0	4	50

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tercapai 1 laporan SPIP Tahun 2024 yang merupakan capaian dari target IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan II tahun 2024. Capaian tersebut adalah Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 dan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2024 dan Laporan SPIP TW I Tahun 2025.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian

kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 20. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
86,39	78	84,22	107	3	80	105

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 telah melebihi target Triwulan II yaitu 84,22 dari target 78. Adapun capaian ini dilakukan dengan

pemenuhan peningkatan kapasitas pegawai dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan lainnya.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, capaian indikator indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025 mengalami peningkatan sejumlah 3%. Hal tersebut dikarenakan jumlah dan minat pegawai dalam mengikuti pelatihan meningkat.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indeks profesionalitas (IP ASN) lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kegiatan olahraga senam bersama di bulan April
2. Evaluasi Kinerja ASN BPSPL Denpasar Triwulan 1
3. Menyiapkan tindak lanjut permohonan mutasi a.n Milka
4. Menyiapkan usulan kebutuhan pegawai tahun 2025
5. Menyiapkan usulan ujian kompetensi Jabatan fungsional Kepegawaian
6. Menyiapkan Rohaniwan untuk pelantikan Jabatan fungsional
7. Menyiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
8. Menyiapkan administrasi mutasi internal. 3 orang mutasi dari wilker ke kantor Gianyar dan 1 orang mutasi ke Wilker
9. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat periode Agustus 2025
10. Menyiapkan usulan calon Plt Kasubbag Umum BPSPL Denpasar
11. Melakukan Peremajaan Data SIASN

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan:

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ Itjen\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti\ BPSPL\ Denpasar}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ BPSPL\ Denpasar}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 21. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
100	80	100	125	-	80	125

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL Denpasar tercapai 100% dari target 80%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan II tahun 2024. Capaian tersebut adalah rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2023 yang ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2024 dengan target 80% tercapai 100% dan rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2024 ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2025 dengan target 80% tercapai 100% .

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Denpasar) tanggal 19-25 Januari 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP
2. Menyiapkan dokumen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi
3. Melakukan upload dokumen tindaklanjut pada Aplikasi SIDAK KKP
4. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut
5. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut

IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSPL Denpasar Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{Jumlah\ Temuan\ LHP\ BPK\ BPSPL\ Denpasar\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ temuan\ dalam\ LHP\ BPK\ BPSPL\ Denpasar}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 22. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Adapun hanya terdapat progres kegiatan yaitu telah melakukan Tindak Lanjut atas temuan BPK RI pada pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAUTRA tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Telah melakukan Tindak Lanjut atas temuan BPK RI pada pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAUTRA tahun 2024

IK 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.

Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Formulasi perhitungan yaitu dengan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 23. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress kegiatan Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

e. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) adalah Evaluasi pengisian data dukung WBK dan Rapat

Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada bulan Maret 2025

IK 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- Pengawasan sistem kearsipan internal
  a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
  b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.
- Pengawasan pengelolaan arsip aktif
  Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
- Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
  Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Denpasar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI yang mencakup aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
   - penciptaan arsip (25%)
   - penggunaan arsip (25%)
   - pemeliharaan arsip (25%)
   - penyusutan arsip (25%)
2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%)
   - sumber daya manusia kearsipan (50%)
   - prasarana dan sarana (50%)
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 24. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

IK 16. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$Presentase\ RUP\ PBJ\ yang\ diumumkan\ di\ SIRUP = \frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumukan\ Pada\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} \text{ x } 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 25. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 15	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	76	100	120 (kinerjaku)	-	76	120

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar tercapai 100% dari target 76%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024 karena Indikator Kinerja ini ada pada tahun 2025 dan tidak ada pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan revisi Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Revisi POK 1 yang telah disahkan
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan sesuai revisi DIPA 2 dalam rangka efisiensi anggaran
- Revisi Rencana Umum Pengadaan pasca efisiensi anggaran
- Pengisian kertas kerja data RUP pasca efisiensi anggaran
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP

IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: Mengumumkan informasi publik; Menyediakan

informasi publik; Sarana dan Prasarana; Kelembagaan; dan Digitalisasi.

Formula Perhitungan:

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
2. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
3. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
4. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.
5. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 26. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW II	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	91	-

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan kehumasan yaitu publikasi secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan publikasi kegiatan secara rutin.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 ini Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBP Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar

Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaanya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-. Total realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Per 31 Maret 2025) sesuai data omspan sebesar Rp2.592.915.587,- (12,57%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp1.766.447.046,- (20,74%) dan realisasai belanja barang Rp826,468.541,- (6,90%).

Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBP dari Kementerian Keuangan. Sampai dengan Triwulan II terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp2.395.198.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.395.198.000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan II (Per 30 Juni 2025) sesuai data omspan sebesar Rp5.090.577.395,- (24,68%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp3.873.645.353,- (45,48%), belanja barang Rp1.216.932.042,- (10,15%), dan belanja modal Rp0,- (0%).

Adapun realisasi anggaran BPSPL Denpasar secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. *Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025*

Uraian			Pagu	Realisasi	
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		4,904,731,000	0	0.00 %
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		4,904,731,000	0	0.00 %
QMA	Data dan Informasi Publik		0	0	0.00 %
QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		0	0	0.00 %
REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		4,904,731,000	0	0.00 %
REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA		4,904,731,000	0	0.00 %
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		0	0	0.00 %
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		0	0	0.00 %
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		0	0	0.00 %
PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		0	0	0.00 %
HB.2366	Penataan Ruang Laut		0	0	0.00 %
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		0	0	0.00 %
PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah		0	0	0.00 %
WA	Program Dukungan Manajemen		11,252,771,000	5,365,752,906	47,68 %
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		11,252,771,000	5,365,752,906	47,68 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		10,961,818,000	5,306,951,352	48,41 %
EBA.956	Layanan BMN		48,770,000	7,142,434	14.65 %
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		15,294,000	10,376,668	67.85 %
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		6,335,000	0	0.00 %
EBA.962	Layanan Umum		81,009,000	5,898,500	7,28 %
EBA.994	Layanan Perkantoran		10,810,410,000	5,283,533,750	48,87 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		65,355,000	18,174,160	27,81 %
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		65,355,000	18,174,160	27,81 %
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		225,598,000	40,627,394	18,01 %
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		70,594,000	6,615,368	9,37 %
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		49,991,000	5,123,269	10.25 %
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		105,013,000	28,888,757	27,51 %

BAB IV
Penutup

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar hingga Triwulan II Tahun 2025 dinilai baik jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 109,85% dengan uraian sebagai berikut :

1. IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) (95,80)
2. IK 9 Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) (2 Dokumen)
3. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) (84,22);
4. IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) (100%)
5. IK 15 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%) (100%)

Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar; dan
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran.

1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode Triwulan I Tahun 2025 terhadap perbaikan kinerja ke depan antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar; dan	Telah dilakukan revisi anggaran
Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait status penerbitan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut.	Telah dilakukan koordinasi

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
Victor Gustaaf Manoppo	**Getreda Melsina Hehanussa**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		**20.627.700.000**

Jakarta 24Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Pesisir dan Laut Denpasar
Victor Gustaaf Manoppo	**Getreda Melsina Hehanussa**

2. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Revisi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
A. Koswara	**Getreda Melsina Hehanussa**

Lembar Pengesahan		
No.	**Jabatan**	**Paraf**
1.	Sekretaris DJPK	
2.	Katimja Program Setditjen PK	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	80
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		**19.752.700.000**

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
A. Koswara	**Getreda Melsina Hehanussa**

Lembar Pengesahan		
No.	**Jabatan**	**Paraf**
1.	Sekretaris DJPK	
2.	Katimja Program Setditjen PK	

3. Penghargaan yang Diterima BPSPL Denpasar

– Penghargaan Satker dengan Presentase Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 yang Diserahkan pada Bulan Januari 2025

– Piagam Penghargaan Atas Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik Triwulan IV Tahun 2024

– Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.362/MEN-KP/III/2025

Penghargaan diberikan kepada:

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Jakarta, 6 Maret 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

- Satuan Kerja Terbaik Ke-2 Kategori Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Transaksi Tertinggi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar Semester II Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar Nomor KEP-40/KPN.2201/2025 tanggal 16 Januari 2025

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
DENPASAR NOMOR : KEP-40/KPN.2201/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK
KATEGORI PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH TRANSAKSI TERTINGGI
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DENPASAR SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE BA	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA
2.	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
3.	029	400569	PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA

- Piagam Penghargaan atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik (109,47) Triwulan I Tahun 2025

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada Unit Kerja:

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi **Predikat Baik (109.47)**
Triwulan I Tahun 2025

Jakarta, 21 April 2025
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

A. Koswara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Piagam Penghargaan atas Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) yang diserahkan pada Juni 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Piagam Penghargaan

Nomor 612/SJ/TU.220/VI/2025

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih Diberikan Kepada :

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 sebesar 98,80 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)

Jakarta, 30 Juni 2025
Sekretaris Jenderal,

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

BPSPL DENPASAR
#BijakMengelolaLaut

Salam PRIMA

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN